

Judul : Presiden Jokowi : RUU Migas Harus Perkuat Kemandirian Energi Nasional
Tanggal : Kamis, 24 Januari 2019
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 8

Presiden Jokowi:

RUU Migas Harus Perkuat Kemandirian Energi Nasional

[JAKARTA] Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) memerlukan kajian yang cermat dan hati-hati agar tidak bertentangan dengan konstitusi. Keberadaan RUU Migas yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), diharapkan akan memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

"RUU ini adalah inisiatif DPR. Oleh karena itu, kita harus kaji dengan cermat dan hati-hati agar RUU ini tidak bertentangan dengan konstitusi," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja yang membahas tentang penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Kantor Kepre-

sidenan, Jakarta, Rabu (23/1).

RUU Migas paling tidak harus mampu menjawab empat tantangan di sektor energi dan sesuai amanat konstitusi, yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, di antaranya sumber daya alam harus bisa dikelola putra-putri Indonesia serta pendanaan untuk pengelolaan sumber daya alam harus dari pendapatan dalam negeri.

Presiden Jokowi mengatakan, RUU harus mampu memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Sebab migas yang merupakan sumber daya pembangunan strategis, meski tidak terbarukan.

"Karena itu, tujuan pembentukan RUU ini harus mendorong produksi migas, tapi juga mendukung penguatan kapasitas nasional, penguatan industri dalam negeri dan

investasi SDM di industri migas," katanya.

Menurut Presiden Jokowi, pembentukan RUU Migas sekaligus juga dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan hukum untuk reformasi tata kelola migas sehingga lebih efisien, transparan, tidak berbelit-belit, sederhana, dan berkelanjutan. "Harus memberikan nilai tambah," katanya.

Dukung Pemangkasan Impor

Hadir dalam rapat itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkumham Yasonna Laoly, Dirut Pertamina Nicke

Widyawati, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

Sementara itu, Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto menuturkan bahwa revisi RUU Migas harus dapat menjadi landasan untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Pasalnya, upaya yang selama ini dilakukan pemerintah untuk memangkas impor migas dinilai belum berdampak signifikan.

Menurut dia, impor minyak mentah hanya bisa dikurangi jika produksi minyak dalam negeri naik. Untuk itu, perlu ada eksplorasi maif untuk menaikkan cadangan dan produksi minyak nasional. Selain itu, implementasi kegiatan pengurusan tahap lanjut (*enhanced oil recovery/ EOR*) skala penuh satu lapangan perlu segera dilakukan.

Tak kalah penting, lanjutnya, perbaikan iklim usaha hulu migas juga harus dijalankan. Salah satunya, yakni layanan satu pintu di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam penyelesaian isu perizinan, perpajakan, dan pengadaan lahan.

Di sektor hilir, tutur Pri Agung, ketergantungan impor BBM bisa dipangkas dengan adanya percepatan pembangunan kilang BBM. Selain itu, pemerintah juga perlu lebih mengonkretkan implementasi biodiesel 20% (B20) dan memperluas diversifikasi energi ke gas dan energi terbarukan.

Revisi Undang-Undang Migas, tegasnya, harus memasukkan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan impor migas. [ID/M-6]